PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

¹Adi Wahyono, ²Farrel Allaam Arkananta Majid, ³Sandy Hanggara, ⁴Andi Rivandi Yunaf, ⁵Haza Irsyadul Furqan Bachri, ⁶Firmansyah Burhanudin Elmasry, ⁷Kuswan Hadji
Email: [1wahyonoadi0122@gmail.com](mailto:wahyonoadi0122@gmail.com), [2farelarkananta@gmail.com](mailto:farelarkananta@gmail.com),
[3sandyhanggara13@gmail.com](mailto:sandyhanggara13@gmail.com), [4andiyunaf18@gmail.com](mailto:andiyunaf18@gmail.com), [5hazabachri511@gmail.com](mailto:hazabachri511@gmail.com),
[6firmansyahelmasry@gmail.com](mailto:firmansyahelmasry@gmail.com)

^{1,2,3,4,5,6}Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Tidar
⁷Dosen Program Studi Hukum, Universitas Tidar

Abstract

Public participation in the formation of laws and regulations is a fundamental aspect of a healthy and functioning democracy. Indonesia has several legal frameworks that regulate public participation in the formation of laws and regulations. One of the most significant is Law No. 12/2011 on the Formation of Legislation. This law emphasizes the importance of community involvement. The media serves as a link between the government and the public, providing relevant information and a forum for public discussion. Thus, the media helps create a more transparent and accountable environment. This study uses empirical research methods that emphasize the real circumstances in people's lives and the social behavior that has an influence on them. The purpose of this research is to analyze the picture of community participation in a structured manner.

Keywords: Community Participation, media role, and liaison

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aspek fundamental dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyediakan informasi yang relevan, dan menjadi forum diskusi publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang menekankan pada keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan perilaku sosial yang memiliki pengaruh di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran partisipasi masyarakat secara terstruktur.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Peran Media, Dan Penghubung

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aspek fundamental dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Di Indonesia, partisipasi masyarakat diakui sebagai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Proses demokratis ini memastikan bahwa suara dan kepentingan berbagai lapisan masyarakat terwakili

dalam pembentukan hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Partisipasi masyarakat memberikan legitimasi dan akuntabilitas pada proses legislasi. Dengan melibatkan masyarakat, pembuat undang-undang dapat memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Partisipasi ini juga mendorong transparansi, mengurangi peluang korupsi, dan meningkatkan kualitas hukum yang dihasilkan.

Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengesahan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Misalnya, melalui mekanisme konsultasi publik, di mana draft peraturan dibuka untuk komentar dan masukan dari masyarakat. Selain itu, peran media dan teknologi informasi juga semakin penting dalam memfasilitasi partisipasi ini.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi partisipasi masyarakat seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan mekanisme partisipasi. Banyak warga yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi. Selain itu, akses informasi yang terbatas juga menjadi kendala. Meskipun informasi tentang draft peraturan perundang-undangan seharusnya dapat diakses oleh publik, dalam praktiknya, tidak semua informasi tersebut mudah didapatkan oleh masyarakat. Ketimpangan akses ini sering kali terjadi di daerah-daerah terpencil, di mana infrastruktur teknologi informasi masih minim.

Tantangan lainnya adalah partisipasi yang bersifat formalitas. Ada kecenderungan bahwa konsultasi publik dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa benar-benar mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Hal ini menyebabkan

ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam partisipasi masyarakat. Platform online seperti situs web pemerintah, media sosial, dan aplikasi khusus untuk partisipasi publik telah mempermudah akses informasi dan keterlibatan masyarakat. Melalui teknologi ini, masyarakat dapat memberikan masukan secara lebih cepat dan efisien. Media massa juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyediakan informasi yang relevan, dan menjadi forum diskusi publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pendekatan yang komprehensif. Pertama, peningkatan edukasi publik mengenai hak-hak mereka dan mekanisme partisipasi sangat penting. Kampanye pendidikan dan sosialisasi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Kedua, peningkatan akses informasi harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua informasi terkait draft peraturan dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi harus dioptimalkan untuk menyebarkan informasi ini.

Ketiga, pelibatan masyarakat harus dilakukan secara nyata dan substansial. Proses konsultasi publik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, mempertimbangkan masukan dari masyarakat, dan memberikan umpan balik yang jelas tentang bagaimana masukan tersebut digunakan dalam proses legislasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah elemen krusial dari demokrasi yang berfungsi dengan baik. Meskipun ada banyak tantangan dalam implementasinya, upaya untuk meningkatkan partisipasi ini harus terus dilakukan. Dengan kerangka hukum yang kuat, penggunaan teknologi, dan strategi yang tepat, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih legitim, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian secara empiris terkait judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", pembahasan dapat mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian yang akan digunakan, misalnya kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya (metode campuran). Alasan pemilihan pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data

Identifikasi sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, seperti: Data primer: wawancara dengan masyarakat, pejabat pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya. Data sekunder: dokumen peraturan perundang-undangan, laporan, publikasi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, seperti: Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan masyarakat atau pemangku kepentingan. Observasi partisipan atau non-partisipan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya. Survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif dari masyarakat.

Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti, misalnya masyarakat di suatu wilayah tertentu atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknik sampling yang akan digunakan (purposive sampling, random sampling, atau lainnya) dan kriteria pemilihan sampel.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan analisis isi (content analysis) untuk menganalisis dokumen peraturan perundang-undangan dan data kualitatif lainnya. Analisis statistik deskriptif atau inferensial untuk menganalisis data kuantitatif dari survei atau kuesioner. Triangulasi data untuk memvalidasi temuan dari berbagai sumber data.

5. Pertimbangan Etika

Persetujuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penelitian. Kerahasiaan identitas dan data pribadi partisipan. Penghindaran konflik kepentingan atau bias dalam penelitian.

Pembahasan metode penelitian empiris ini dapat memberikan panduan untuk melakukan penelitian yang sistematis dan terstruktur terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, perlu disesuaikan dengan konteks dan tujuan penelitian yang spesifik.

Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Dalam sistem demokrasi modern, peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Berikut adalah beberapa poin pembahasan dan analisis mengenai hal tersebut:

a. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, atau saran melalui mekanisme seperti dengar pendapat publik, rapat dengar pendapat, atau pengajuan petisi. Secara tidak langsung, masyarakat dapat memilih wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi mereka di lembaga legislatif.

b. Perwakilan Masyarakat di Lembaga Legislatif

Anggota lembaga legislatif, seperti DPR/DPRD, adalah perwakilan masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum. Mereka bertanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif dalam memilih wakil-wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.

c. Pengawasan Masyarakat terhadap Proses Legislasi

Masyarakat berperan penting dalam mengawasi proses legislasi agar sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Masyarakat dapat memberikan kritik, masukan, atau bahkan menggugat jika ada peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau melanggar konstitusi.

d. Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

Masyarakat juga berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajibannya di bawah peraturan tersebut.

e. Penyesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat

Peraturan perundang-undangan harus responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, masukan dan aspirasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam praktiknya, peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Partisipasi masyarakat yang aktif, perwakilan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas proses legislasi sangat penting untuk menjamin terwujudnya peraturan perundang-undangan yang adil, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting karena regulasi yang dibuat atau dibentuk pada dasarnya objeknya adalah masyarakat luas. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat harus

terlibat secara aktif dan signifikan. Berikut adalah beberapa analisis dan penjelasan tentang peran masyarakat dalam proses ini:

1. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat harus terlibat dalam proses perancangan, penyusunan, dan pembahasan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena undang-undang tersebut akan berimplikasi secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Naskah Akademik

Naskah akademik adalah suatu hal yang sangat urgen dan strategis dalam pembentukan undang-undang yang baik. Naskah akademik memberikan gambaran hasil kajian dan penelitian di lapangan, sehingga undang-undang tersebut dirancang atas dasar kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

3. Implementasi

Meskipun partisipasi masyarakat dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, implementasinya masih belum maksimal. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum menjadi prioritas, sehingga kritik masyarakat dalam bentuk ketidakpercayaan kepada kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene menyuarakan aspirasi masyarakat.

4. Tujuan

Tujuan utama dibentuknya suatu undang-undang ialah untuk mencapai tujuan nasional yang sudah diatur di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang sangat penting untuk menghasilkan produk hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

5. Kendala

Kendala partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang adalah kurangnya aspiratif dan kurang partisipatif terhadap masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah selaku pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang tidak terbuka dan kurang aspiratif terhadap masyarakat.

6. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan penulis adalah diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat selalu melibatkan masyarakat di dalam merancang peraturan perundang-undangan dengan nyata dan tidak formalitas saja, serta diharapkan setiap masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk terlibat dalam perancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Bagaimana mekanisme pemenuhan hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa mekanisme untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Berikut beberapa analisis dan pembahasan terkait mekanisme tersebut:

1. Partisipasi Publik

Salah satu mekanisme penting adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik melalui mekanisme konsultasi publik, penyampaian masukan secara tertulis, ataupun audiensi dengan pihak pembentuk undang-undang. Partisipasi publik ini memungkinkan aspirasi dan kepentingan masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses tersebut.

2. Transparansi dan Akses Informasi

Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan, menganalisis dampak dari peraturan yang akan dibentuk, dan memberikan masukan yang konstruktif.

3. Penilaian Dampak Regulasi

Sebelum suatu peraturan perundang-undangan disahkan, seharusnya dilakukan penilaian dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment/RIA) yang komprehensif. RIA ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak yang akan ditimbulkan oleh peraturan tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan hidup. Hasil dari RIA ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang terdampak.

4. Uji Publik

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seringkali dilakukan uji publik atau public testing. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik, atau masukan terhadap rancangan peraturan yang akan dibentuk. Masukan dari masyarakat kemudian dapat dipertimbangkan untuk penyempurnaan rancangan tersebut.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Setelah peraturan perundang-undangan diberlakukan, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat. Evaluasi ini dapat melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga peraturan dapat disesuaikan atau direvisi jika terdapat kekurangan atau dampak negatif yang tidak diinginkan.

Meskipun demikian, mekanisme-mekanisme di atas perlu diimplementasikan secara konsisten dan efektif untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan kesadaran dan kemauan politik dari pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk mendengarkan suara masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik.

Mekanisme pemenuhan hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah beberapa analisis dan penjelasan tentang mekanisme ini:

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rapat dengar

pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat juga berhak untuk memberikan masukan sejak tahap perencanaan dalam penyusunan Prolegda Provinsi.

2. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan masukan, mengikuti rapat dengar pendapat umum, dan mengikuti sosialisasi.

3. Hak Masyarakat

Hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi hak untuk memberikan masukan, mengikuti proses pembentukan, dan mengetahui keberadaan dan dampak peraturan perundang-undangan. Hak masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan kepentingan masyarakat.

4. Dampak

Dampak dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat signifikan. Partisipasi masyarakat dapat membantu meminimalisir penolakan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan legitimasi peraturan perundang-undangan.

5. Kendala

Kendala partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kurangnya aspiratif dan kurang partisipatif terhadap masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah selaku pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang tidak terbuka dan kurang aspiratif terhadap masyarakat.

6. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan penulis adalah diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat selalu melibatkan masyarakat di dalam merancang peraturan perundang-undangan dengan nyata dan tidak formalitas saja, serta diharapkan setiap masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk terlibat dalam perancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, maka partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung penyusunan peraturan yang ada di negara. Selain itu upaya atau peran aktif dari masyarakat dibutuhkan dalam hal ini. Terlebih lagi dalam memberikan gagasan atau aspirasi yang bersifat publik menjadi masukan sebagai bentuk peran nyata dari masyarakat yang turut serta mengikuti perkembangan dalam hal menyusun aturan yang ada. Jika kedepannya masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan ide positif maka sangat tepat menjadi program penyempurna bagian penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu gerakan yang tepat sasaran dari pemerintah dalam mendukung partisipasi masyarakat yang mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi. Mewujudkan gagasan dan peraturan yang saling terhubung dapat menjadi tujuan bangsa sebagai penghubung keberhasilan pemerintahan yang baik dan didukung oleh masyarakat melalui semangat bela negara dalam hal mengikuti jalannya pembentukan aturan.

Saran

Agar peran masyarakat lebih dicover kembali supaya menghadirkan semangat memperjuangkan keberhasilan negara dalam cita-cita bangsa. Penerapan partisipasi yang telah dilandaskan dengan keadilan dan kebersamaan harus terus diupayakan sampai pada akhirnya generasi penerus memperbaharui penyampaian gagasan yang dimuat dalam media sosial sebagai sarana menyalurkan ide positif dan sosialisasi secara langsung tanpa adanya hambatan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

<https://www.google.co.id/search?q=PENGKAIJIAN+HUKUM+TENTANG+PARTISIPASI+MASYARAKAT+DALAM+PENENTUAN+ARAH+KEBIJAKAN+PRIORITAS+PENYUSUNAN+PERATURAN+PERUNDANG-UNDANGAN.&oq=PENGKAIJIAN+HUKUM+TENTANG+PARTISIPASI+MASYARAKAT+DALAM+PENENTUAN+ARAH+KEBIJAKAN+PRIORITAS> diakses pada 5 Juni 2024

Jurnal Jdih Maritim: partisipasi masyarakat secara umum

Website: hukum online mengenai partisipasi dan proses pembentukan peraturan Jurnal konstitusi mkri diakses pada 5 Juni 2024

Artikel Ilmiah journal metro univ diakses pada 6 Juni 2024

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media, 2012.

Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi, Bandung: PT Alumni, 2011.

Idul Rishan, Hukum & Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta: FH UII Press, 2020

Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang- Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan," Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2 Desember 2015,